



Proses Penanganan *Clearance Out* Karantina pada *Single Submission* Kapal MT. Jupiter Star

Yelvianus Wau^{1*}, Yursal², Yusnidah³

¹⁻³ Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

Alamat: Jl. Pertempuran No. 125, Pulo Brayan Kota Medan

Korespondensi penulis: yelvianuswauvelvinwau@gmail.com

Abstract. *This paper discusses the quarantine clearance out handling process through the SSM Single Submission System for the issuance of the Port Health Quarantine Certificate PHQC on the MT Jupiter Star ship managed by PT Semesta Sejahtera Lestari, Lampung Branch. Quarantine clearance out is an important stage in ensuring that ships departing from the port meet all health requirements and are free from the threat of diseases that can be transmitted to other areas. This process begins with the submission of an application by the ship's agent through the SSM System, which is designed to facilitate interaction between various related agencies, including the KKP Port Health Office, Customs, Immigration, and Ksop. After the application is submitted, quarantine officers will conduct a health inspection of the ship, including an examination of the crew and other health documentation. The results of this inspection are then recorded in the system and, if all requirements are met, a PHQC will be issued. This paper also identifies the challenges faced in the process, such as data integration between agencies that is sometimes less than optimal, and the importance of improving coordination between related parties to ensure a smooth clearance out process. Ultimately, the implementation of the SSM system is expected to increase efficiency and transparency in the process of issuing port health certificates, which in turn supports the smooth running of international shipping and trade activities. In writing this paper, the author used field research and library research methods.*

Keywords: *Handling, clearance out, quarantine*

Abstrak. Makalah ini membahas proses penanganan *clearance out* karantina melalui Sistem *Single Submission* SSM untuk penerbitan *Port Health Quarantine Certificate* PHQC pada kapal MT Jupiter Star yang dikelola oleh PT Semesta Sejahtera Lestari, Cabang Lampung. *Clearance out* karantina merupakan tahapan penting dalam memastikan bahwa kapal yang akan berangkat dari pelabuhan memenuhi semua persyaratan kesehatan dan bebas dari ancaman penyakit yang dapat menular ke wilayah lain. Proses ini diawali dengan pengajuan permohonan oleh agen kapal melalui Sistem SSM, yang dirancang untuk memfasilitasi interaksi antara berbagai instansi terkait, termasuk Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP, Bea Cukai, Imigrasi, dan Ksop. Setelah permohonan diajukan, petugas karantina akan melakukan pemeriksaan kesehatan kapal, termasuk pemeriksaan terhadap awak kapal dan dokumentasi kesehatan lainnya. Hasil pemeriksaan ini kemudian dicatat dalam sistem dan, apabila semua persyaratan terpenuhi, PHQC akan diterbitkan. Makalah ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut, seperti integrasi data antar instansi yang kadang kurang optimal, serta pentingnya peningkatan koordinasi antara pihak-pihak terkait untuk memastikan kelancaran proses *clearance out*. Pada akhirnya, penerapan sistem SSM diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses penerbitan sertifikat kesehatan pelabuhan, yang pada gilirannya mendukung kelancaran aktivitas pelayaran dan perdagangan internasional. Dalam penulisan makalah ini penulis menggunakan metode *field research* dan *library research*.

Kata kunci: Penanganan, *clearance out*, karantina

1. LATAR BELAKANG

Kesehatan kapal dan awaknya merupakan peranan yang sangat penting dalam operasional pelayaran internasional. Sertifikat Kesehatan Kapal Pelabuhan PHQC menjadi dokumen penting yang harus dimiliki setiap kapal sebelum diizinkan untuk berlayar dan berlabuh di pelabuhan selanjutnya. Proses penerbitan sertifikat ini melibatkan berbagai tahapan, termasuk proses *clearance out* karantina, yang bertujuan untuk memastikan kapal

bebas dari risiko kesehatan yang dapat mengancam keselamatan *crew* dan lingkungan diatas kapal. Proses *clearance out* karantina harus mematuhi regulasi internasional dan standar kesehatan pelabuhan, yang sering diperbarui. Hal ini memerlukan sistem SSM yang akurat dan selalu diperbarui. Keterlambatan dalam pemrosesan atau penerbitan *certificate PHQC* bisa disebabkan oleh masalah dalam sistem SSM, seperti kesalahan data, keterbatasan sistem, atau kurangnya integrasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam proses karantina, Keakuratan data kapal, termasuk informasi kesehatan dan sanitasi, sangat penting. Jika data yang dimasukkan ke dalam sistem SSM tidak akurat atau tidak lengkap, maka penerbitan *certificate PHQC* bisa terhambat, Proses *clearance out* karantina sering melibatkan beberapa lembaga, seperti otoritas kesehatan pelabuhan, karantina, dan pihak terkait lainnya. Jika sistem SSM tidak memadai atau tidak dirancang dengan baik, ini dapat menyebabkan masalah dalam proses *clearance out*, seperti pengolahan data yang lambat atau kesalahan sistem yang menghambat penerbitan *certificate*, Prosedur dan protokol yang tidak berubah ubah atau tidak jelas dapat menambah kompleksitas proses *clearance out* dan mempengaruhi penerbitan *certificate PHQC*, Kualitas penanganan *clearance out* juga dipengaruhi oleh pelatihan dan kompetensi personel yang terlibat dalam menggunakan sistem SSM dan proses karantina. Mengidentifikasi dan menangani masalah-masalah ini dengan sistematis sangat penting untuk memperlancar proses *clearance out* karantina dan memastikan penerbitan *certificate PHQC* yang efisien dan akurat.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Proses

Menurut Hulu (2021) proses adalah suatu urutan kegiatan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam.

Menurut Daft (2021 :123), mendefinisikan proses sebagai urutan langkah – langkah yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk pembuatan produk atau penyediaan layanan.

Pengertian Penanganan

Menurut Hermansyah (2023) penanganan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu.

Pengertian Sertifikat

Menurut Suryanto (2020) Sertifikat merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan untuk menyatakan bahwa individu telah memenuhi syarat atau standar tertentu yang telah ditetapkan, sertifikat sering kali dibutuhkan dalam proses perizinan sektor atau akreditasi sektor.

Pengertian Kapal

Menurut Undang Undang NO 17 Tahun 2008 pengertian Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Clearance Out

Menurut (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014) *Clearance Out* Kapal merupakan kegiatan berlayar sebuah kapal *Port Clearance* atau surat persetujuan berlayar. Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh syahbandar kepada setiap kapal yang hendak berlayar. Setiap kapal yang hendak berlayar harus memiliki surat persetujuan berlayar yang diterbitkan oleh syahbandar.

Pengertian Pelabuhan

Menurut Undang – Undang No 17 Tahun 2008 pengertian pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

Pengertian Sistem *Single Submission*

Menurut Rachman (2021 : 45-60), Sistem *Single Submission* (SSM) adalah suatu mekanisme integrasi layanan perizinan dan non perizinan yang memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan izin secara elektronik melalui satu pintu, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan mempercepat proses perizinan usaha.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian lapangan (*field research*)

Untuk memperoleh hasil dari suatu masalah dan kesimpulan diperlukan data informasi yang objektif. Adapun metode-metode pengamatan yang digunakan dalam memperoleh data dan informasi dalam laporan makalah ini sebagai berikut:

- Pengamatan Lapangan (*Field Study*)

Pengamatan ini dilakukan untuk sistem informasi standar dalam menangani proses penanganan *clearance out* karantina pada sistem ssm untuk menerbitkan *certificate* PHQC pada Kapal MT. Jupiter Star oleh PT. Semesta Sejahtera Sejati Cabang Lampung yang bersangkutan. Pengamatan ini dilakukan dengan pencatatan-pencatatan terhadap penemuan yang dianggap perlu, dengan teknik sebagai berikut:

- Wawancara (*Interview*)

Melakukan wawancara/tanya jawab kepada dengan kepala Cabang PT. Semesta Sejahtera Sejati Cabang Lampung tersebut terhadap permasalahan yang dirumuskan seputar proses penanganan *clearance out* karantina pada sistem ssm untuk menerbitkan *certificate* PHQC pada Kapal MT. Jupiter Star.

- Pengamatan / *Observasi*

Dari pengamatan tersebut penulis menemukan cara untuk mengetahui bagaimana Proses Penanganan *Clearance Out* karantina pada system ssm untuk menerbitkan *certificate* PHQC pada kapal MT. Jupiter Star oleh PT Semesta Sejahtera Lestari cabang Lampung. Dalam pengamatan tersebut penulis menemukan kendala dalam jaringan dan system ssm error.

Metode penelitian perpustakaan (*library research*)

Dalam pengamatan ini dilakukan dengan cara membaca buku-buku yang ada serta media lainnya yang menyangkut sistem informasi standar pelayanan kapal dan barang yang mempelajari bahan-bahan dari perpustakaan yang ada hubungannya dengan penulisan makalah ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penanganan *Clearance Out* Karantina Pada Sistem SSM Untuk menerbitkan *Certificate* PHQC Pada Kapal MT. Jupiter Star oleh PT. Semesta Sejahtera Lestari Cabang Lampung

- **Proses *Clearance out* Karantina Pada Sistem SSM untuk Penerbitan PHQC**

Proses *clearance out* karantina pada kapal MT. Jupiter Star melalui Sistem *Single Submission* (SSM) merupakan proses yang terintegrasi untuk memastikan kapal tersebut memenuhi semua persyaratan kesehatan sebelum meninggalkan pelabuhan. Berikut adalah gambaran umum dari prosedur tersebut:

- Pengajuan Permohonan

Registrasi dan *Login* ke Sistem Pemilik atau agen kapal MT. Jupiter Star harus masuk ke dalam Sistem *Single Submission* (SSM) yang dikelola oleh otoritas pelabuhan atau badan kesehatan terkait.

Pengguna mengisi formulir digital yang mencakup informasi detail tentang kapal, rencana perjalanan, kondisi kesehatan awak kapal, operator kapal, npwp, siupal operator, rencana kegiatan dan riwayat pelabuhan yang disinggahi. Data ini mencakup informasi tentang status sanitasi kapal, hasil pemeriksaan kesehatan awak kapal, dan sertifikasi sebelumnya.

- Pemeriksaan Dokumen / Data Agen

Verifikasi Otomatis oleh SSM Sistem SSM akan melakukan verifikasi otomatis terhadap data yang telah diinput, mencocokkannya dengan database kesehatan dan regulasi yang berlaku. Sistem ini juga akan memastikan bahwa kapal memiliki semua dokumen yang diperlukan, seperti sertifikat sanitasi kapal, laporan pemeriksaan kesehatan, dan lainnya. Nama agen, alamat agen, npwp agen, nomor siupal agen, kategori pelayaran tanggal berangkat dari pelabuhan asal, KKP, wajib melakukan pembayaran, waktu estimasi pelayanan, tanggal berakhir dokumen.

Pemeriksaan oleh Petugas Karantina: Setelah verifikasi otomatis, petugas karantina akan melakukan pengecekan manual terhadap dokumen yang diunggah untuk memastikan kepatuhan dengan standar kesehatan nasional dan internasional. Jika ada dokumen yang tidak lengkap atau data yang meragukan, petugas akan mengirimkan permintaan klarifikasi melalui SSM.

– Persetujuan dan Penerbitan Sertifikat

Evaluasi Akhir: Setelah semua dokumen dan hasil inspeksi (jika ada) diverifikasi, petugas karantina akan melakukan evaluasi akhir. Jika semua persyaratan terpenuhi, sistem akan memberikan persetujuan untuk penerbitan Sertifikat Kesehatan Kapal Pelabuhan (PHQC). Penerbitan Sertifikat: Sertifikat PHQC akan diterbitkan secara digital melalui SSM dan dapat diunduh oleh pemilik atau agen kapal. Sertifikat ini diperlukan sebagai bukti bahwa kapal MT Jupiter Star telah memenuhi semua persyaratan kesehatan dan diizinkan untuk melanjutkan perjalanan.

– Pelaporan dan Dokumentasi

Setelah dokumen *SSECC medical chest* dan dokumen *crew list* yang sudah lengkap diupload dan dokumen berhasil terkirim berarti dokumen sudah di *approve* oleh petugas karantina, buka pembayaran billing, *copy* nomor billing pembayarannya dan setelah itu melakukan pembayaran, setelah lunas simpan bukti bayar lalu print billig sebagai bukti lampiran ke karantina.

Arsip Elektronik: Semua data dan dokumen terkait proses *clearance out* disimpan dalam arsip elektronik SSM untuk kepentingan audit dan referensi di masa depan. Pemilik kapal dan otoritas terkait dapat mengakses riwayat ini jika diperlukan.

Pelaporan ke Pihak Terkait: Hasil akhir dari proses *clearance out* juga akan dilaporkan kepada otoritas pelabuhan dan instansi kesehatan yang relevan, baik di dalam negeri maupun internasional, untuk memastikan koordinasi yang baik dalam penanganan kesehatan kapal.

– Pemberian Izin Berlayar

Pengeluaran Surat Izin Berlayar: Setelah Sertifikat PHQC diterbitkan dan semua persyaratan lainnya terpenuhi, kapal MT Jupiter Star akan diberikan izin untuk berlayar ke pelabuhan berikutnya. Proses ini menunjukkan bagaimana SSM memfasilitasi dan menyederhanakan prosedur *clearance out* karantina, memastikan efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan yang ketat.

• **Dokumen – Dokumen Pendukung dalam Penerbitan PHQC**

PHQC (*Port Health Quarantine Certificate*) adalah salah satu dokumen penting yang diperlukan dalam proses *clearance out* atau izin berlayar bagi kapal, termasuk kapal tanker seperti MT. Jupiter Star, dan dokumen ini diterbitkan oleh otoritas

kesehatan pelabuhan, yang menyatakan bahwa kapal telah memenuhi semua persyaratan kesehatan karantina.

Untuk proses penanganan *clearance out* karantina pada Sistem SSM, dalam rangka menerbitkan PHQC (Pemberitahuan Hasil Kegiatan Karantina) untuk kapal MT. Jupiter Star, biasanya diperlukan beberapa dokumen penting yaitu :

- Manifest Kargo Kapal: Merinci muatan yang dibawa oleh kapal, yang biasanya mencakup jenis, jumlah, dan asal barang.
- Surat Keterangan Kesehatan Kapal (*Ship Sanitation Certificate*): Dikeluarkan oleh otoritas kesehatan untuk memastikan bahwa kapal telah memenuhi standar kebersihan yang ditetapkan.
- Surat Keterangan Fumigasi (Jika diperlukan): Jika ada muatan yang memerlukan fumigasi, surat ini menjadi bukti bahwa proses tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- Surat Pengantar dari Kapal: Surat ini biasanya diberikan oleh nahkoda atau perwakilan kapal kepada otoritas karantina sebagai permohonan untuk proses *clearance out*.
- Sertifikat Karantina (Jika diperlukan): Sertifikat ini diterbitkan setelah pemeriksaan karantina dilakukan terhadap muatan yang memerlukan tindakan karantina.
- Dokumen Kepabeanan (*Customs Declaration*): Berisi pernyataan formal tentang barang-barang yang diimpor atau diekspor, yang harus sesuai dengan peraturan bea cukai. Dokumen lampiran bea cukai berupa *Ship Particular*, *Crew List*, *Bondedstore*, *Port Clearance*, *Cargo Manifest*, dan *Stowage Plan*.
- Pernyataan Kapal (*Ship's Declaration*): Dokumen ini menyatakan rincian umum kapal dan muatannya, seringkali diperlukan oleh otoritas karantina untuk memverifikasi informasi lainnya.
- Dokumen Persetujuan dari Otoritas Karantina: Dokumen ini merupakan hasil dari proses karantina yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa kapal dan muatannya telah lulus inspeksi dan memenuhi persyaratan karantina.

Semua dokumen ini harus diproses melalui sistem SSM untuk mendapatkan PHQC yang diperlukan untuk *clearance out* karantina. Pastikan semua informasi dalam dokumen tersebut akurat dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait.

- Dokumen *Maritime Declaration Of Health*

Biasanya mencakup informasi tentang nama kapal, negara bendera, pelabuhan berangkat, jumlah orang di kapal, kesehatan *crew* kapal riwayat kesehatan kapal. Otoritas karantina akan menggunakan informasi dalam *maritime declaration of health* untuk menilai resiko kesehatan yang mungkin dibawa oleh kapal dan memutuskan tindakan yang diperlukan sebelum kapal diizinkan *clearance out*.

- **Hambatan yang Di Hadapi dalam Proses Penanganan *Clearance Out***

- Tantangan Teknis

Keterbatasan Infrastruktur Teknologi: Tidak semua pelabuhan di Indonesia memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung implementasi SSM, seperti jaringan internet yang stabil, perangkat keras yang memadai, dan sumber daya manusia yang terampil.

- Masalah Konektivitas dan Keandalan Sistem

Koneksi internet yang tidak stabil atau gangguan sistem SSM dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses *clearance out* karantina, terutama di daerah terpencil.

- Resistensi Terhadap Perubahan

Resistensi dari Sumber Daya Manusia adalah Petugas pelabuhan atau karantina yang terbiasa dengan sistem manual mungkin menunjukkan resistensi terhadap perubahan ke SSM yang sepenuhnya digital, yang dapat menghambat kelancaran proses.

- Kurangnya Pemahaman Pengguna

Pengguna sistem, baik itu agen kapal atau pemilik kapal, mungkin mengalami kesulitan dalam menggunakan SSM karena kurangnya pemahaman tentang cara kerja sistem.

- Masalah Keamanan Data

Ancaman Keamanan Siber Karena SSM menangani banyak data sensitif terkait kesehatan dan operasional kapal, ancaman terhadap keamanan siber seperti peretasan dan kebocoran data menjadi perhatian serius.

- **Solusi Hambatan dalam Sistem *Single Submission* (SSM) pada proses *clearance out* karantina yaitu :**
 - Investasi dalam peningkatan infrastruktur teknologi di pelabuhan-pelabuhan utama dan pelabuhan kecil perlu ditingkatkan. Selain itu, pelatihan bagi petugas pelabuhan dalam penggunaan SSM secara efektif dapat membantu mengurangi masalah ini.
 - Penerapan sistem redundansi dan cadangan yang kuat, serta memastikan dukungan teknis yang cepat dan responsif dapat meminimalkan dampak dari masalah teknis ini. Selain itu, pengembangan aplikasi SSM yang dapat berfungsi secara *offline* dengan sinkronisasi data saat koneksi tersedia juga bisa menjadi solusi.
 - Pembentukan tim koordinasi lintas instansi dengan tanggung jawab yang jelas dan komunikasi yang efektif dapat membantu mengatasi masalah ini. Selain itu, pengembangan protokol standar yang mengatur proses kolaborasi antar-instansi dapat memastikan semua pihak terlibat secara efektif dalam SSM.
 - Harmonisasi SOP antar-instansi melalui konsultasi dan penetapan standar operasional bersama yang disesuaikan dengan SSM. Pelatihan bersama dan penyelarasan SOP juga akan membantu memastikan semua pihak bekerja dengan standar yang sama.
 - Pengembangan SSM dengan fleksibilitas tinggi untuk memperbarui sistem sesuai dengan perubahan regulasi. Selain itu, perlu adanya mekanisme update regulasi yang cepat dan efisien, serta komunikasi yang intensif antara pembuat kebijakan dan pengelola SSM.
 - Peningkatan kerja sama internasional untuk menyelaraskan regulasi lokal dengan standar internasional, serta revisi kebijakan domestik yang dapat mengakomodasi persyaratan global tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Proses penanganan *clearance out* karantina melalui Sistem *Single Submission* SSM untuk penerbitan *Port Health Quarantine Certificate* PHQC pada kapal MT Jupiter Star yang dikelola oleh PT Semesta Sejahtera Lestari, Cabang Lampung, menunjukkan peningkatan efisiensi dan transparansi. SSM memungkinkan integrasi yang lebih baik antara berbagai instansi terkait, seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP, dan otoritas

pelabuhan, sehingga mempercepat proses administrasi dan pengambilan keputusan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, terutama terkait dengan integrasi data antar instansi yang belum sepenuhnya optimal. Namun, secara keseluruhan, implementasi SSM telah membantu mengurangi potensi kesalahan manusia dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan karantina.

Peningkatan Integrasi Sistem Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan integrasi data antar instansi dalam SSM, guna memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan dapat diakses dengan cepat dan akurat oleh semua pihak terkait. Pelatihan dan Edukasi: Penyelenggaraan pelatihan dan edukasi yang berkelanjutan bagi petugas karantina dan agen kapal mengenai penggunaan SSM akan membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan, sehingga dapat mengurangi potensi kesalahan dalam proses pengajuan dan pemeriksaan.

DAFTAR REFERENSI

- Aruan, D. S. T., Ginting, S., Lilis, L., & Sabila, F. H. (2023). Proses Penerbitan Dokumen Statement Of Fact (SOF) Mv. Skatzoura Oleh Pt. Lampung Shipping Agency Bandar Lampung. *MASMAN Master Manajemen*, 1(4), 230-240.
- Daft, R. L. 2021. *Understanding Management*. Jawa Tengah: Cengage Learning. (<https://www.cengage.com>).
- Danilwan, Y., Sutria, Y., Sabila, F. H., Taruna, T., Said, A. A., Fransiska, E., ... & Rinaldi, F. (2025). UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN SAMPAH DI DAERAH PESISIR DESA PULAU KAMPAI KABUPATEN LANGKAT. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 7(1), 741-744.
- Hermansyah. Ahmad, Y., dan Suparman. 2023. *Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Di Pelabuhan*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. (<https://repository.uin-suska.ac.id>).
- Hulu, A. 2021. Warna Sari. Jawa Tengah: Lutfi Gilang. (<https://lmsspada.kemdikbud.go.id>).
- Hutagaol, H., Lilis, L., & Sabila, F. H. (2024). Proses Penerbitan Izin Sea Trial Kapal Sv. Sv. Bourbon Jindamaneer Pada Ksop Khusus Batam Oleh PT. Gemalindo Shipping Batam. *Ocean Engineering: Jurnal Ilmu Teknik dan Teknologi Maritim*, 3(4), 01-10.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 309, 310 dan 311.
- Pasaribu, L. U. R. E., Dirhamsyah, D., & Sabila, F. H. (2023). Process Clearance In & Clearance Out Millennium 806 Use the Application B-SIM by PT. Putra Samudera Inti in the Area Free Trade Zone Batam. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 1(4), 403-410.

Peraturan Menteri Pehubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 Tentang *Clearance Out*.

Rachman.2021. Sistem *Single Submission* (SSM). Inovasi Layanan perizinan Terpadu di Indonesia. Surabaya. *Indonesian Public Policy Review*. (<https://oss.go.id>).

Rapika, R., Sabila, F. H., & Siregar, N. S. (2025). Tantangan dan peluang dalam manajemen kru kapal di era digital pada PT. Equinox Sentra Bahari Cabang Belawan. *Jurnal Adiguna Maritim Indonesia*, 2(1), 22-25.

Sabila, F. H. (2018). Karakteristik dan Penerapan Islamic Corporate Governance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 2(2), 116-125.

Simarmata, J., & Sabila, F. H. (2023). Proses Penerbitan Grosse Akta Kapal di KSOP Khusus Batam pada PT. Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam. *Jurnal Riset Manajemen*, 1(4), 429-436.

Siregar, G. A., Siregar, N. S., & Sabila, F. H. (2025). Prosedur Penerbitan Sertifikat Safe Manning Kapal pada Kantor Syahbandar oleh PT. Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 3(1), 173-181.

Suryandi, F.A., et. al. 2022. Implementasi Pelayanan *Inaportnet* di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun. *Jurnal Wedana*. Vol. 7 No. 2. Hal. 1-5.

Suryanto, B. 2020. Standar dan Validasi Sertifikat Profesional. Bandung. Penerbit ABC (<https://www.encyclopedia.com>).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Yudho. 2022. Integrasi Layanan Perizinan Melalui Sistem *Single Submission* (SSM). Jakarta. *Journal of Public Administration*. (<https://oss.go.id>).